

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amerika Serikat telah mendominasi kekuatan besar dunia dengan kepemilikan senjata nuklir dan uranium terbanyak di dunia. Hak veto yang dimiliki Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB mampu mengontrol kebijakan-kebijakan penting yang dikeluarkan lembaga tersebut.

Perkembangan Nuklir Iran tidak luput dari keterlibatan Amerika Serikat didalamnya, pada awalnya program nuklir Iran dibentuk atas perjanjian kerjasama bilateral antar dua negara. Iran merupakan salah satu negara yang cukup lama dalam mengembangkan energi nuklir. Usaha pengembangan nuklir Iran dimulai pada masa pemerintahan Shah Pahlevi.

Dengan bantuan Amerika Serikat di masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi, Iran mulai melakukan penelitian dan pengembangan nuklir. Shah Reza Pahlevi membeli reaktor riset yang memiliki daya sebesar 5 watt dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada tahun 1968 Iran menandatangani *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) dan meratifikasinya pada 1970. Dengan meratifikasi NPT, program nuklir yang dimiliki Iran berhasil diverifikasi oleh IAEA (*International Atomic Energy Agency*). Dengan menandatangani NPT tersebut, sekaligus membuktikan bahwa Iran tidak berencana mengembangkan nuklir untuk pembuatan senjata. Selain itu, di tahun 1974 Iran juga mengajukan draft resolusi kepada Majelis Umum PBB untuk membangun zona bebas senjata nuklir (*nuclear weapon free zone*) di Timur Tengah. Usaha yang dilakukan pemerintah tersebut dinilai berhasil oleh pemerintahan Shah Pahlevi sehingga pada tahun

1972 dia sangat tertarik dan semangat untuk terus meningkatkan usaha pengembangan nuklir. Hasil dari usaha tersebut adalah dengan didirikannya *Atomic Energy Organization of Iran* (AEOI) pada tahun 1974 (Jamaan, Politik Hukum Internasional Dalam Konflik Nuklir Iran-AS, 2007)

Dengan adanya kedekatan bilateral yang dimiliki Amerika Serikat dan Iran pada rezim Shah Reza Pahlevi, Iran kehilangan jati dirinya sebagai negara muslim akibat kediktatoran Shah Reza Pahlevi yang membiarkan AS mengeksploitasi Iran, sekaligus menjadikan Iran tempat singgah AS untuk mengontrol wilayah Timur Tengah. Adanya pengaruh model kepemimpinan dan budaya barat semakin menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat Iran dan membuat terjadinya revolusi Islam pada tahun 1979.

Pasca Revolusi Islam pada tahun 1979 yang menggulingkan rezim Shah Reza Pahlevi yang pro terhadap Barat, Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatic dan menarik diri dari Iran. Amerika Serikat menentang dan ingin menghentikan suplai bahan bakar uranium. Amerika Serikat menganggap bahwa nuklir Iran adalah sebuah ancaman dan mengganggu stabilitas di Timur Tengah. Pada 24 September 2005, Badan Energi Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency/IAEA*) menyatakan Iran telah gagal mematuhi kewajibannya terhadap kesepakatan penjagaan (*safeguard agreements*) dari NPT. Iran menjadi objek kecaman dunia Internasional dikarenakan program Nuklir yang dijalaninya (Kholil A. H., 2014)

Amerika Serikat takut bahwa program Nuklir yang dibuat oleh Iran bukan hanya sekedar untuk bahan bakar nuklir dan merupakan program damai, tetapi untuk membuat bom atom atau senjata pemusnah masal lainnya. Kekhawatiran Amerika Serikat dan sekutunya semakin memuncak dengan melancarkan kecaman terhadap pengayaan uranium yang dilakukan Iran. Kecaman yang disponsori oleh Amerika Serikat dan sekutunya berangkat dari kecurigaan bahwa hal

tersebut sebenarnya untuk menutupi program pengembangan senjata nuklir (Alhadar, 2007)

Ketidakpercayaan Amerika Serikat terhadap Iran terus berlanjut. Dimulai pada Maret 1995 diawal pemerintahan Presiden Bill Clinton yang memberikan sanksi kepada Iran sampai kepada pemerintahan presiden Barack Obama yang memerintah pada tahun 2009-2017 juga akan lanjut memperpanjang sanksi tersebut apabila Iran masih melanjutkan program uraniumnya. Berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh Presiden George W. Bush yang menolak setiap kontak langsung dengan Iran, Barrack Obama membuat kebijakan dengan membangun hubungan buruk dengan negara-negara Muslim dan lebih mengedepankan perundingan dan cara damai. Amerika Serikat dengan *power* yang dimilikinya berusaha menghentikan program nuklir tersebut dengan menyusun undang-undang terorisme nuklir, menekan IAEA untuk menghentikan kerja teknisnya dengan Iran maupun mengembargo Iran agar perekonomiannya tidak stabil. Washington berulang kali mengancam akan menggunakan kekuatan militer terhadap Iran apabila Iran tidak mau berkerjasama dalam program nuklirnya.

Dengan mengatasnamakan hak nasional bangsa Iran, pengembangan nuklir Iran yang bertujuan damai untuk kebutuhan listrik, riset kedokteran, dan riset teknologi tersebut membuat Iran menolak mundur dari program nuklir yang dimilikinya. Pemberian sanksi-sanki terhadap program uraniumnya ini tidak membuat Iran menyerah untuk berhenti memproduksi uranium bagi kesejahteraan negaranya. Amerika Serikat beserta negara sekutunya menjatuhkan sanksi melalui berbagai macam embargo teknologi termasuk produk-produk yang memiliki fungsi ganda, juga embargo ekonomi, investasi dan layanan jasa dan sebagainya. Amerika Serikat juga melakukan serangan militer dan menyerahkan dokumen nuklir Iran kepada Dewan Keamanan PBB.

Amerika Serikat dan sekutunya terus berupaya menghentikan pengembangan proyek tenaga nuklir tersebut karena merasa kepentingannya di kawasan Timur Tengah terancam, apalagi saat Iran siap menyerang Israel yang merupakan aliansinya dan simbol hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah bila hak pengembangan nuklir dan keamanan negaranya terganggu. Tanpa mempedulikan pedoman NPT dan IAEA, Amerika Serikat bersama sekutunya memberikan paket-paket sanksi terhadap Iran dan mengucilkan Iran dari dunia internasional. Terbentuknya NPT (*Nuclear non-Proliferation Treaty*) pada tahun 1968 yang bertujuan membatasi jumlah pemilik senjata nuklir hanya kepada negara anggota tetap DK PBB yaitu, AS, Rusia, Cina, Perancis dan Inggris. Perimbangan kekuatan antara AS dan Rusia terus terjadi, kedua negara tersebut saling berlomba-lomba untuk mengembangkan program nuklirnya. Amerika Serikat terus berupaya agar negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya untuk tidak menjalankan program nuklir. Hal ini dikarenakan AS khawatir kepentingan negaranya terganggu karena adanya pengembangan program nuklir yang tidak sejalan tersebut.

Secara keseluruhan, Amerika Serikat menerapkan standar ganda dalam kasus nuklir Iran. Standar ganda yang dilakukan yaitu dengan membantu pengembangan senjata nuklir India, Pakistan dan Israel yang pada dasarnya tidak terdaftar di NPT dan IAEA (Winingsih, 2009, hal. 27-28). Standar ganda tersebut diberikan AS kepada negara-negara sekutunya, terutama Israel yang merupakan sekutu terpenting untuk melawan perkembangan nuklir Iran di wilayah Timur Tengah (Rahman M. , 2003, hal. 206). Hingga perang dingin berakhir pada tahun 1991 yang dimenangkan oleh AS, penerapan standar ganda terus berlanjut. Hal ini menunjukkan sikap ketidakadilan yang dilakukan AS terhadap negara-negara yang mengembangkan nuklir dan patuh terhadap NPT dan IAEA. (Jamaan, Politik Hukum Internasional Dalam

Konflik Nuklir Iran-AS, 2007). Demi melindungi aliansinya meskipun Iran terikat NPT dan IAEA, AS terus mengancam program nuklir Iran.

Pergantian kepemimpinan yang ada di Amerika Serikat juga mempengaruhi upaya penghentian poliferasi nuklir Iran. Para pemimpin Amerika Serikat yang berasal dari kelompok kepentingan yang berbeda maupun partai yang berbeda juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan termasuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran. Pemerintahan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan George W. Bush selama dua periode pada tahun 2001-2009 yang berasal dari Partai Republik atau biasa disebut *hawkish* yang berisi kelompok-kelompok kepentingan yang berasal dari golongan neo-konservatif yang mencetak para pemimpin yang realist. Menghasilkan politik internasional yang hard power melalui jalur ekspansif dan dominasi militer. Sedangkan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barak Obama yang berasal dari partai Demokrat atau biasa disebut partai *dove*. Para pemimpin yang berasal dari partai Demokrat menjalankan pemerintahan dengan mengutamakan cara diplomasi dengan menjalankan demokrasi, hak asasi manusia dan juga ekonomi liberal. Pada masa pemerintahan Barack Obama dengan mengedepankan jalur diplomasi melalui negosiasi bersama kelompok P5+1 dengan pemerintahan Iran, Amerika Serikat berupaya menyelesaikan permasalahan nuklir Iran dengan mengajak Iran bernegosiasi melalui sebuah kesepakatan.

Sejak tahun 2006 terjadi upaya penghentian poliferasi nuklir Iran, kelompok negara–negara P5+1 (lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB: AS, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok + Jerman) terlibat dalam upaya diplomasi dengan Iran terkait program nuklirnya. P5 merujuk pada kelima negara anggota tetap dewan keamanan, dimana P diambil dari kata *permanent* yang artinya tetap dan ditambah Jerman. Masing–masing anggota tetap dewan keamanan PBB

memiliki hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan, yang membuat persetujuan mereka dalam proses negosiasi ini mutlak dibutuhkan. Sedangkan Jerman adalah salah satu mitra dagang utama Iran sehingga diikutkan dalam proses negosiasi ini. Britania, Jerman dan Perancis merupakan anggota Uni Eropa yang paling berpengaruh dan kadang disebut dengan *EU three* atau *EU-3*. Ketiga negara ini telah bersama bernegosiasi dengan Iran sejak 2003. Dengan kata lain bahwa P5+1 merupakan (U3-3)+3 (Wikipedia, 2017).

Perundingan yang berlangsung antara Iran dan kelompok P5+1 yang dipelopori oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, Rusia dan Jerman dilakukan untuk menangani program nuklir Iran demi menjaga keamanan dan kedamaian dunia, agar Iran tidak membuat senjata nuklir maupun mengecam dunia dengan uranium yang dimilikinya. (IRIB Indonesia, 2015) Akhirnya setelah 12 tahun terjadi negosiasi yang panjang mengenai program nuklir yang dimiliki Iran yang dimulai pada tahun 2003 oleh EU-3 dan dilanjutkan diplomasi yang dilakukan P5+1. Pada 14 Juli 2015, Iran telah mencapai kesepakatan dengan kelompok P5 + 1 di Vienna, Austria dengan menghasilkan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (*Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA*) yaitu pengakuan kekuatan-kekuatan dunia terhadap hak-hak nuklir bangsa Iran. Berdasarkan kesepakatan Vienna semua instalasi nuklir Iran tidak ada yang dihentikan aktivitasnya. Semua aktivitas instalasi nuklir Iran tetap berlanjut, termasuk di daerah Natanz dan Fordow. Negara-negara besar mengakui program nuklir tujuan damai Iran serta menghargai hak nuklir bangsa Iran dalam kerangka undang-undang dan konvensi internasional. Program nuklir Iran yang semula didistorsi sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia diluruskan menjadi obyek kerjasama Iran dengan khalayak internasional sesuai standar internasional. PBB mengakui Iran sebagai negara berkekuatan nuklir tujuan damai, termasuk di bidang daur ulang bahan bakar nuklir dan

pengayaan uranium. JCPOA menjamin kelanjutan program pengayaan Uranium di Iran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dijelaskan rumusan masalah, yaitu : “Mengapa Amerika Serikat menyetujui *Joint Comprehensive Plan of Action* terkait nuklir Iran pada tahun 2015 ?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi serta untuk memilih kerangka pemikiran yang tepat dalam membentuk hipotesa, maka diperlukan suatu kerangka teoritis. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan model Aktor Rasional dalam proses pembuatan keputusan politik luar negeri Graham T. Allison.

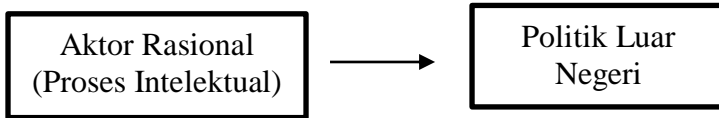
Politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (decision maker) suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Plano & Olton, 1999)

Dalam studi hubungan internasional, kita dapati bahwa kajian kebijakan luar negeri sangat luas dan kompleks. Kebijakan luar negeri dalam pengertian luas terdiri atas pola-pola yang diwujudkan oleh suatu negara dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan nasional, dalam hubungannya dengan negara lain atau dilakukan terhadap lingkungan eksternalnya. Politik luar negeri dapat berarti sebagai tindakan rasional (rational action) suatu negara dalam usaha memenuhi kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional, dapat juga berarti hanya sebagai pernyataan gramatik yang diucapkan oleh para pemimpin atau penguasa suatu negara terhadap masyarakat internasional,

dapat pula sebagai agregasi seluruh kepentingan dalam negeri suatu negara atau bangsa (Warsito, 1998, hal. 73)

Teorisasi dalam hubungan internasional yang mempelajari politik luar negeri, yaitu Graham T. Allison yang mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Ada tiga model yang diajukan oleh Graham T. Allison yaitu Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik. Untuk dapat menjelaskan dan menerangkan permasalahan di atas, penulis menggunakan model yang pertama, yaitu Model Aktor Rasional. Dalam proses pembuatan tulisan ini penulis menggunakan Aktor Rasional untuk dapat mempermudah mendeskripsikan mengenai proses pembuatan keputusan luar negeri serta mengenai fenomena perubahan politik luar negeri sebuah negara.

Model Aktor Rasional :



Mohtar Mas'ood dalam bukunya, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi":

".....politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan

demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.” (Mas’oed M. , 1990, hal. 234)

Setiap negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Kemudian yang paling mendasar adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan melakukan alternatif-alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Tabel 1.1 Tabel Untung Rugi

	Opsi	Keuntungan	Kerugian
1.	Alternatif A	Ada	Ada
2.	Alternatif B	Ada	Ada
3.	Alternatif C	Ada	Ada

Sumber : Graham T. Alison, “The Essence Of Decision”, dikutip dari diktat perkuliahan Teori Hubungan Internasional, Nur Azizah, Fisipol-UMY, 2005.

Tabel 1.2 Tabel Untung Rugi Amerika Serikat menyetujui JCPOA tahun 2015 :

Opsi	Keuntungan	Kerugian
Menyetujui	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi ancaman nuklir Iran, AS dapat memantau perkembangan program nuklir Iran • Menjaga stabilitas ekonomi dan militer AS • Menjaga keharmonisan hubungan bilateral AS-Iran • Menunjukkan posisi dan kredibilitas AS sebagai DK PBB • Menjaga hegemoni AS di wilayah Timur Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertahanan dan keamanan AS serta Israel sebagai aliansinya dapat terancam dengan adanya nuklir Iran • Iran dapat lebih unggul dalam nuklirnya dalam hal medis maupun teknologi
Opsi	Keuntungan	Kerugian
Menolak	<ul style="list-style-type: none"> • Iran akan terus melanjutkan program pengayaan uranium, sehingga dapat lebih unggul dalam nuklirnya untuk medis maupun teknologi serta pengayaan tersebut akan menimbulkan kekhawatiran akan keamanan Internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kredibilitas dan posisi AS sebagai DK PBB diperhitungkan. • Akan timbul ketidakharmonisan hubungan bilateral antara AS dan Iran • AS akan kekurangan support minyak dari Iran • income AS dari Iran menurut karena banyaknya sanksi yang menghambat kerjasama ekonomi antara kedua negara

Dengan menggunakan model Aktor Rasional tersebut, disimpulkan bahwa Amerika Serikat akan lebih

banyak memperoleh keuntungan jika menyetujui JCPOA daripada menolak JCPOA.

D. Hipotesa

Jawaban sementara yang perlu diverifikasi di pembahasan selanjutnya berdasarkan kerangka pemikiran model Aktor Rasional maka dapat ditarik hipotesa bahwa alasan Amerika Serikat menyetujui *Joint Comprehensive Plan Of Action* terkait nuklir Iran pada tahun 2015 yaitu :

1. Amerika Serikat akan mendapatkan sejumlah keuntungan dengan menyetujui JCPOA berupa : dapat menambah peluang Amerika Serikat dalam mendapatkan kontrak kerjasama ekonomi oleh Iran dengan dihapusnya sanksi sehingga kekhawatiran akan berkurangnya stabilitas ekonomi dan militer dapat dihilangkan, Amerika Serikat dapat menunjukkan posisi dan kredibilitasnya sebagai DK PBB dengan keberhasilan kesepakatan ini, dan dapat menjaga hegemoni Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah, serta melindungi Israel yang merupakan aliansinya di Timur Tengah.
2. Amerika Serikat dapat menetralsir potensi kerugian berupa ancaman nuklir Iran dikarenakan Amerika Serikat dapat memantau perkembangan program nuklir tersebut melalui IAEA sehingga program nuklir tersebut tidak akan diproduksi untuk senjata nuklir yang akan mengkhawatirkan keamanan Internasional.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Pemerintah Amerika Serikat menyetujui *Joint Comprehensive Plan of Action* terkait nuklir Iran Tahun 2015.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pembuatan keputusan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam *Joint Comprehensive Plan of Action* terkait nuklir Iran Tahun 2015. Pengambilan

tahun 2015 karena pada tahun 2015 kesepakatan ini berhasil dibuat di Vienna, Austria, dan di masa pemerintahan Barrack Obama upaya untuk menyelesaikan persoalan nuklir Iran melalui JCPOA berhasil dibuat. Meskipun demikian dalam pembahasan selanjutnya masih memungkinkan peneliti untuk membahas masalah-masalah lain yang relevan dan mendukung pokok permasalahan.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan dari berbagai macam sarana. Penelitian kualitatif berusaha membangun realitas dan memahami realitas tersebut sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas (Deddy, 2001)

1. Jenis Penelitian

Tulisan ini termasuk jenis penelitian pustaka/kepustakaan (*libraryresearch*) yaitu dengan menghimpun data dari perpustakaan maupun internet yang berupa literatur ataupun dokumen tertulis yang dijadikan sumber dan dipergunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diteliti (Nawawi, 2001, hal. 30)

2. Teknik Pengumpulan Data

Tulisan ini merupakan penelitian yang data-datanya berasal dari sumber sekunder. Menurut Sugiyono, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2008, hal. 225)

3. Teknik Analisis Data

Tulisan ini akan mengaplikasikan kombinasi teknik deduktif- induktif. Deduktif dipakai karena penjelasan berangkat dari kerangka pemikiran/konseptual atau teori. Kerangka pemikiran/konseptual yang diasumsikan bersifat umum kemudian dijabarkan ke permasalahan yang bersifat

khusus dan kontekstual (Mas'ood M. , 1990, hal. 79-81). Sedangkan induktif dipakai untuk menyimpulkan atau generalisasi setelah melihat fakta- fakta yang berkaitan dan mendukung kerangka pemikiran/konseptual yang diasumsikan. Kerangka ini yang akan menuntun pengumpulan data yang relevan dan arah pembahasan dalam tulisan ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Diharapkan pada bab ini dapat memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan dibahas.

Bab II akan membahas tentang kebijakan - kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat terkait Nuklir Iran. Pemaparan akan dimulai dari Hubungan Amerika Serikat-Iran terkait nuklir Iran. Sikap Amerika Serikat terhadap perkembangan nuklir Iran melalui NPT dan DK-PBB. Serta akan dibahas sanksi – sanksi yang diberikan Amerika Serikat kepada Iran.

Bab III membahas Proses persetujuan *Joint Comprehensive Plan of Action* yang didalam pembuatan kesepakatan ini terdapat kelompok-kelompok yang menolak disetujuinya *Joint Comprehensive Plan of Action*. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai *Bargaining* kelompok P5+1 dalam *Joint Comprehensive Plan of Action*. Kemudian bab ini akan diakhiri dengan pembahasan mengenai garis besar isi *Joint Comprehensive Plan of Action*.

Bab IV akan membahas faktor-faktor penyebab Amerika Serikat menyetujui *Joint Comprehensive Plan of Action*. Berisi pemaparan keuntungan yang diperoleh Amerika Serikat dan meminimalisir potensi kerugian yang diperoleh akibat kesepakatan tersebut. Pada bab ini penulis akan menjawab permasalahan yang ada di Rumusan masalah yang telah penulis buat.

Bab V merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan dari seluruh uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.